

**KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN
BERDASARKAN TINGKAT KERAWANAN LONGSOR
DI KABUPATEN SEMARANG**



**Tesis
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

Magister Ilmu Lingkungan

**Yuniarto Dwi S
L4K009019**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2010

TESIS
KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN
BERDASARKAN TINGKAT KERAWANAN LONGSOR
DI KABUPATEN SEMARANG

Disusun oleh:

Yuniarto Dwi S
L4K009019

Mengetahui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc

Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

LEMBAR PENGESAHAN
KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN
BERDASARKAN TINGKAT KERAWANAN LONGSOR
DI KABUPATEN SEMARANG

Disusun oleh:

Yuniarto Dwi S
L4K009019

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 27 September 2010
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua:

Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc

.....

Anggota:

1. Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT

.....

2. Ir. Nani Yuliasuti, MSP

.....

3. Ir. Dwiyanto JS, MT

.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya sehingga tesis dengan judul **Kesesuaian Penggunaan Lahan Berdasarkan Tingkat Kerawanan Longsor Di Kabupaten Semarang** ini dapat terselesaikan dengan baik. Atas penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc dan Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan tesis
- Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA, dan Dra. Hartuti Purnaweni, MPA selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Kabupaten Semarang yang telah memberikan ijin dan bantuan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Semarang.
- Kedua orang tua dan kakakku atas doa yang tak henti dipanjatkan, dorongan semangat, bantuan moral dan materiil
- Teman-teman MIL Undip Angkatan 24 yang telah memberikan dukungan, semangat, kebersamaan dan kerjasamanya selama ini
- Pak Imam, Haris, Bram, Pras, Mas Pangi yang telah membantu dalam pemetaan dan analisis data
- Mbak Eva, Mbak Fitri, Mas Hastomo, Mas Doni, Mas Sulis, Mbak Rini dan Mas Adi di MIL Undip atas segala bantuannya.
- Semua pihak yang membantu dalam penyusunan tesis ini

Dan dalam penyusunan tesis ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan dan perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi segenap pihak.

Semarang, September 2010

Penulis

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semarang, September 2010

Yuniarto Dwi S

RIWAYAT HIDUP



YUNIARTO DWI S. Lahir di Salatiga tanggal 5 Juli 1986, merupakan putera kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Rudji Harsono dan Ibu Wahyu Widodo. Pendidikan dasar sampai menengah seluruhnya ditamatkan di Salatiga. Di mulai pada tahun 1992 ketika terdaftar sebagai siswa pada SD Negeri 2 Salatiga dan kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Salatiga pada tahun 1998. Jenjang SMU dilanjutkan pada tahun 2001 di SMU Negeri 3 Salatiga. Jenjang pendidikan tinggi diawali pada tahun 2004 ketika melanjutkan pendidikan pada Program Studi Diploma-III Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang dan kemudian pada tahun 2007 melanjutkan ke jenjang Strata I pada jurusan S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang yang diselesaikan pada tahun 2009.

Pada tahun yang sama, penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata II pada Program Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Diponegoro Semarang dengan bidang Konsentrasi Perencanaan Lingkungan.

ABSTRAK

Penyelenggaraan penataan ruang sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut salah satunya menjadi arahan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dimana kota harus mampu berkompetisi secara sukses dalam pertarungan ekonomi global dan mampu mempertahankan vitalitas budaya serta keserasian lingkungan. Namun, di sisi lain upaya menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dirasa masih menghadapi tantangan yang berat yang disebabkan oleh pandangan dan perilaku antroposentris yang telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan bencana lingkungan salah satunya semakin meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana alam khususnya tanah longsor. Dalam proses penataan ruang baik pada tingkat nasional, Provinsi atau kabupaten/kota pertimbangan tingkat kerawanan longsor seringkali diabaikan dan cenderung memberikan arahan pemanfaatan ruang sesuai normatif perencanaan serta tidak didasarkan atas pertimbangan yang menyeluruh.

Kabupaten Semarang sebagai bagian dalam sistem perkotaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kabupaten dari 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan bencana alam terutama bencana longsor yang salah satu penyebabnya adalah adanya potensi gerakan tanah dengan potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pola-pola dan pengembangan penggunaan lahan yang didasarkan pada tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan penelitian lapangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa arah perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Semarang terkonsentrasi pada sekitar koridor jalur utama penghubung Semarang – Surakarta dan Semarang – Yogyakarta yang didominasi untuk kawasan terbangun dengan kegiatan non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa. Wilayah Kabupaten Semarang yang memiliki ketinggian wilayah yang beragam, mengindikasikan bahwa wilayah Kabupaten Semarang berada pada zona berpotensi longsor A, B, C dan dengan potensi bencana longsor berada pada tingkat kerawanan longsor rendah hingga tinggi. Tingkat kerawanan longsor tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain intensitas curah hujan, kelerengan, jenis tanah, batuan penyusun, struktur geologi, penggunaan lahan dan kepadatan permukiman. Keberadaan wilayah Kabupaten Semarang yang berada pada zona berpotensi longsor A, B, C serta berada pada tingkat kerawanan longsor rendah hingga tinggi secara langsung berpengaruh terhadap kesesuaian pengembangan kawasan dimana di wilayah Kabupaten Semarang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan konsep pengembangan kawasan budidaya terbatas dan kawasan lindung. Secara spesifik, arahan kesesuaian pengembangan penggunaan lahan di Kabupaten Semarang dengan mengacu pada konsep pengembangan kawasan budidaya terbatas yaitu sesuai dan dapat dikembangkan serta sesuai dengan pengembangan bersyarat. Sedangkan konsep pengembangan kawasan lindung yaitu tidak sesuai dan tidak layak untuk dikembangkan untuk kawasan terbangun (dipertahankan sebagai fungsi lindung).

Rekomendasi untuk pengembangan penggunaan lahan di Kabupaten Semarang antara lain penerapan sistem terasering pada areal pertanian; menghindari pengolahan lahan di daerah berlereng terjal untuk kegiatan pertanian; meminimalisasi pembebanan pada lereng dengan tidak menggunakan bahan konstruksi yang berlebihan khususnya untuk pengembangan kawasan terbangun; perlu adanya pembatasan, pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap kegiatan pengembangan kawasan pemukiman pada daerah yang curam sehingga tidak membahayakan penduduk yang bermukim; relokasi pada daerah yang aman dari bahaya longsor serta pemulihan fungsi ruang sesuai dengan peruntukan asli dan daya dukung lingkungan

Kata kunci: tata ruang, penggunaan lahan, lingkungan, kerawanan longsor

ABSTRACT

The implementation of spatial planning as a manifestation of the Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, aims to create a safe living space, comfortable, productive and sustainable. That goal was one of them as directives to create a sustainable city where the city should be able to compete successfully in the global economic battle and able to maintain the vitality of the cultural and environmental compatibility. However, on the other hand efforts to create a safe, comfortable, productive, sustainable and felt still facing severe challenges due to anthropocentric views and behaviors that have resulted in environmental degradation and environmental disasters one of them is the increasing frequency and scope of natural disasters especially landslides . In the spatial planning process at both the national, provincial or district level considerations are often ignored and landslide susceptibility tends to provide appropriate spatial use of normative planning and not based on thorough consideration.

Semarang Regency as part of a national and Central Java Province urban system became one of the districts of 31 districts/city in Central Java, which includes the areas prone to natural disasters especially landslides which one of the reasons is the potential for ground movement with the potential for medium to high ground movement. This study aims to assess the suitability of the patterns of land use and development that is based on the level of vulnerability to landslides in the Semarang Regency. This study uses qualitative research methods with the case study and field research.

The results showed that the direction of development of land use in Semarang Regency is concentrated around the main line corridor connecting Semarang - Surakarta and Semarang - Yogyakarta, which was dominated for the region woke up with non-agricultural activities such as industry, trade and services. Semarang Regency that has a height of diverse regions, indicating that the area of Semarang district is at a potential landslide zones A, B, C and with a potential landslide is at a low level to high landslide susceptibility. Landslide vulnerability are influenced by several factors such as rainfall intensity, slope, soil type, rock composer, structural geology, land use and density of settlement. The existence of Semarang regency located at a potential landslide zones A, B, C and are at low level to high vulnerability to landslides directly affect the suitability of the development of the region where in Semarang Regency can be developed as a farming area with limited cultivation area development concept and protected areas . Specifically, the direction of development suitability of land use in Semarang Regency with reference to the concept of limited cultivation area development is appropriate and can be developed and in accordance with the development of parole. While the concept of the development of protected areas that is not appropriate and not appropriate to be developed for the region woke up (maintained as a protected function).

Recommendations for the development of the land use in Semarang Regency, among others, the implementation of terracing system in agricultural areas; avoid the processing of land on steep slope areas for agricultural activities; minimize loading on the slope by not using excessive construction material especially for the development of the region woke up, the need for restrictions, supervision and strict control of development activities in residential areas, steep areas so as not to endanger the population living; relocation in a safe area of landslide hazard and recovery of function space in accordance with the original allotment and environmental capacity.

Keywords: spatial planning, land use, environmental, vulnerability of landslides

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang cukup luas bagi pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota) untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah salah satunya adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Nyaman adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai social budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Sedangkan berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pulaantisipasi unuk mengmebangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumberdaya alam tak terbarukan (UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Keseluruhan tujuan tersebut diarahkan pada harmonisasi lingkungan alam dan lingkungan buatan, mampu mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia serta dapat memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tujuan tersebut juga menjadi arahan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dimana kota harus mampu berkompetisi secara sukses dalam pertarungan ekonomi global dan mampu mempertahankan vitalitas budaya serta keserasian lingkungan (Budiharjo dan Sujarto, 2005). Di Pulau Jawa sendiri, konsep kota berkelanjutan salah satunya tercermin dalam filosofis pelestarian lingkungan *Hamemayu Hayuning Bawana* dimana dalam filosofis tersebut, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau

dengan kata lain bahwa makhluk hidup dan lingkungannya adalah sama-sama berperan sebagai subjek dalam hubungan kausalitas (Buwono X, 2006). Inti dari filosofi tersebut adalah setiap manusia dalam berolah pikir dan berolah laku haruslah senantiasa bertujuan untuk melestarikan harmoni dan keindahan dunia, selalu memperhitungkan hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam semesta serta makhluk lainnya.

Namun, di sisi lain upaya menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dirasa masih menghadapi tantangan yang berat yang disebabkan oleh pandangan dan perilaku antroposentris yang telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan bencana lingkungan (Tasdyanto, 2007). Pandangan tersebut mengutamakan kemajuan ekonomi dengan subjek dan orientasi pembangunan pada manusia sehingga lingkungan alam di sub-ordinasikan dibawah kepentingan ekonomi manusia (Salim, 2010). Dalam proses perencanaan tata ruang, sering kali tidak mencantumkan secara jelas proses diagnosis lingkungan dan secara langsung cenderung memberikan arahan pemanfaatan ruang sesuai normatif perencanaan. Hal tersebut membuat rencana yang dihasilkan kurang rasional karena rencana tata ruang lebih sebagai seni mengatur penempatan kegiatan diatas ruang daripada sebagai rangkaian logis dari kesesuaian atas dasar pertimbangan yang menyeluruh (kekuatan pasar, persyaratan lingkungan dan aspek pertanahan) (Soerjodibroto, 2005).

Menurut Budihardjo dan Soejarto (2005), ada beberapa kelemahan dalam proses perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal jangka panjang yang sering tidak tercapai akibat banyaknya ketidakpastian. Di sisi lain terdapat perencanaan yang disusun dengan landasan pemikiran secara *ad hoc* yang berjangka pendek dan kurang berwawasan luas.
2. Produk akhir berupa rencana tata ruang yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik tanpa didukung para pengelola perkotaan dan daerah yang handal dalam resolusi konflik dan dibantu dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan.
3. Terlihat kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup terlalu mengutamakan aspek fisik dan visual (biasanya menyangkut tata guna lahan, system jaringan jalan dan infrastruktur atau prasarana lingkungan). Sedangkan aspek

- yang berkaitan dengan perencanaan komunitas (sosial budaya) dan perencanaan sumberdaya masih belum memperoleh porsi yang semestinya.
4. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama ini belum terkesan sekedar sebagai slogan semata belum terimplementasi dengan nyata.
 5. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas dan sering kali dianggap sekedar sebagai konsumen pasif.
 6. Kurang pekannya penentu kebijakan dan beberapa kalangan professional terhadap pusaka warisan budaya kuno yang pada hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dalam sejarah perkotaan.
 7. Penekanan perencanaan kota dan daerah cenderung lebih berat pada aspek lingkungan binaan dan kurang mendayagunakan lingkungan alamiah.
 8. Kekuatan hukum produk rencana tata ruang begitu tipis sehingga dapat dibalikkan dengan mudah oleh surat keputusan dari penguasa, pengusaha dan pejabat kalangan atas.

Keseluruhan gambaran diatas, mencerminkan bahwa untuk mencapai kualitas ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih jauh dari yang diharapkan yang disebabkan oleh pembangunan kota yang kurang mengandalkan perencanaan tata ruang yang baik dan bahkan ada “pembangkangan” dengan melakukan “pembiaran” terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang ada. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana alam khususnya tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah yang telah menimbulkan kerugian besar berupa korban meninggal, kerusakan lingkungan permukiman, hilangnya harta benda masyarakat, serta kerusakan sarana dan prasarana penunjang kehidupan manusia dan aktivitasnya.

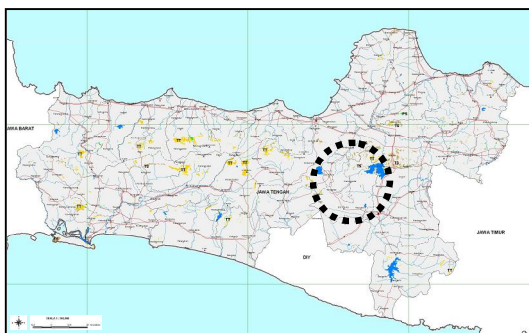
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2007 setidaknya telah terjadi sebanyak 104 kali dengan korban tewas sebanyak 93 orang, 3.524 orang menderita dan mengungsi serta 974 bangunan rumah rusak. Data tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 112 kali tanah longsor dengan korban tewas sebanyak 102 orang, 4.890 orang menderita dan mengungsi serta 956 bangunan rumah rusak. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah, dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah daerah rawan longsor yang masuk zona merah semakin luas dari 3.667 km² pada tahun 2002 menjadi 7.059 km² pada tahun 2009. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sebagian

besar wilayah daratan Indonesia berada dalam lintasan aktifitas pergerakan lempeng bumi menjadi penyebab bencana tanah longsor di banyak kawasan di Indonesia. Semakin intensifnya aktifitas manusia dalam merubah tatanan vegetasi dan geostruktur kawasan dengan alasan kepentingan ekonomi pada daerah hulu dan daerah tertentu yang seharusnya dilindungi keseimbangan ekosistemnya, telah terbukti ikut mempertinggi kejadian longsor. Keadaan ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah disamping lemahnya *law enforcement* terhadap pengawasan pembangunan dan pengembangan di kawasan rawan longsor.

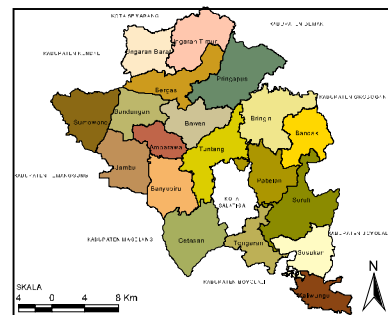
Kabupaten Semarang sebagai bagian dalam sistem perkotaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai kota pusat kegiatan wilayah (KPKW) (Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah). Kebijakan tersebut telah membawa konsekuensi besar terhadap jenis kegiatan dan fasilitas yang harus dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan penduduk yang ada di sekitarnya.



a. Pulau Jawa dan Madura



b. Provinsi Jawa Tengah



c. Kabupaten Semarang

Sumber: Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), Balitbang Departemen Pertanian, BAPPEDA Kabupaten Semarang

Gambar 1.1

Peta Orientasi Kabupaten Semarang

Selain itu, dalam konstelasi regional, nasional, dan internasional, Kabupaten Semarang menjadi bagian dalam kawasan andalan Kedungsepur yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Kawasan andalan merupakan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Keunggulan yang dimiliki Kawasan Kedungsepur sebagai kawasan andalan adalah sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional yang pertumbuhannya sangat pesat khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Strategi pengembangan wilayah Kedungsepur antara lain (Bantek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Kedungsepur Tahun 2005):

- a. Pembangunan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan (*Growth Development*) dengan mengalokasikan pembangunan pada daerah-daerah yang pertumbuhan dan perkembangan pembangunannya tinggi. Daerah yang termasuk kategori ini adalah daerah di sekitar jalan arteri yaitu Weleri – Kendal – Semarang – Ungaran – Bawen – Salatiga – Semarang – Sayung - Demak. Konsep dan strategi yang akan diterapkan pada alternatif ini adalah dengan metode sebagai berikut:
 - Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama (*Growth Pole*), yaitu menumbuhkan alokasi pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan, dalam hal ini kota-kota sebagai pusat pertumbuhan yaitu kota Kendal-Semarang-Demak-Ungaran sebagai generator dan percepatan pertumbuhan.
 - Strategi untuk menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan, antara lain *urban development*, *small town development* dan *secondary cities development* yaitu salah satu usaha untuk mengurangi kesenjangan dan masalah-masalah yang ditanggung oleh kota utama, dengan mendorong pembangunan juga dialokasikan di kota-kota sekitar kota utama dan kota menengah atau kota kecil lainnya (termasuk desa pusat pertumbuhan).
- b. Pembangunan dengan menitikberatkan pada pemerataan (*Equity Development*), hal ini untuk menarik potensi wilayah dengan perkembangan cepat ke arah daerah-daerah lain yang kurang berkembang (khususnya di wilayah selatan dan timur) .
- c. Pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan sekaligus pemerataan (*Growth with Development and Equity*).

Besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang sebagai wilayah pengembangan pusat pertumbuhan, wilayah ini juga menghadapi permasalahan terkait dengan potensi bencana longsor. Menurut Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, wilayah Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dari 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan bencana alam terutama bencana longsor yang salah satu penyebabnya adalah adanya potensi gerakan tanah. Potensi gerakan tanah di Kabupaten Semarang tersebar di 14 kecamatan dengan potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi. Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Ungaran, Klepu, Ambarawa, Pringapus, Bawen, Sumowono, Banyubiru, Getasan, Tengaran, Bringin, Pabelan, Jambu, Susukan dan Suruh. Potensi gerakan tanah menengah adalah daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah dimana zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Sedangkan potensi gerakan tanah tinggi adalah daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah dimana zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal dan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan ruang di kawasan perkotaan cenderung mengalami tantangan yang cukup berat. Tingginya frekuensi bencana longsor dan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari bencana tersebut telah menyadarkan akan perlunya reposisi perilaku manusia dalam mengelola lingkungan hidup yang diletakkan pada sebuah kerangka pikir atau pendekatan yang memungkinkan seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam merevitalisasi ruang kehidupannya agar dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah perlunya pertimbangan potensi longsor dalam proses penataan ruang baik pada tingkat nasional, Provinsi atau kabupaten/kota. Dan di dalam pertimbangan tersebut, perlu disusun suatu "kriteria nasional" yang dapat menjadi acuan dalam penataan ruang dan lingkungan khususnya pada kawasan rawan bencana alam yang terdiri dari dua hal yaitu mutlak harus dihindari untuk pemanfaatan apapun dan masih dapat dikembangkan (bergradasi dengan memanfaatkan konsep mitigasi) (Medrilzam, dkk, 2001).

1.2. Perumusan Masalah

Adanya ketidakstabilan tanah di suatu daerah dapat memberikan pengaruh yang bervariasi tergantung pada sifat, besar dan jangkauan dari gerakan tanah. Dalam situasi yang paling ekstrim, bencana longsor dapat mengancam keselamatan jiwa, kesehatan atau merusak bangunan dan infrastruktur. Beberapa faktor yang memicu terjadinya bencana longsor di Kabupaten Semarang antara lain adanya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi kawasan permukiman dan industri serta kawasan terbangun lainnya yang semakin tidak terkendali yang berlokasi di lereng yang curam dan berada pada daerah resapan air yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung. Alih fungsi lahan tersebut sebagai dampak dari perkembangan Kabupaten Semarang yang sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga telah berimplikasi pada semakin terbatasnya penyediaan ruang/lahan untuk menampung seluruh aktivitas masyarakat serta pembangunan fasilitas dan infrastruktur perkotaan. Namun, di sisi lain hal tersebut telah berakibat air tidak lagi terserap dan tersimpan di dalam tanah, tetapi keluar menggerus lereng-lereng yang tanahnya dari jenis liat.

Keberadaan lahan kritis yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Semarang juga telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap terjadinya bencana longsor. Dari analisis peta lahan kritis wilayah BPDAS Pemali Jratun tahun 2009, lahan kritis di Kabupaten Semarang pada tahun 2009 seluas 46.095 ha atau sekitar 45,69% dan luas tersebut merupakan yang terbesar diantara 19 kabupaten/kota yang masuk wilayah BPDAS Pemali Jratun (BPDAS Pemali Jratun, 2009).

Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya pada tingkat ekstrim dapat merubah nilai efisiensi menjadi eksploitasi. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan alokasi lahan dengan mempertimbangkan aspek kegiatan masyarakat (antara lain intensitas, produktivitas, pertumbuhan) dan aspek sediaan lahan (antara lain sifat fisik, lokasi, luas) (Dardak, 2005).

Rumusan diatas, memunculkan pertanyaan penelitian yang harus dijawab yang terdiri dari pertanyaan besar dan beberapa pertanyaan spesifik, yaitu:

Pertanyaan besar

1. *Bagaimanakah kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Semarang berdasarkan tingkat bahaya longsor?*

Pertanyaan spesifik

1. *Bagaimanakah arah perkembangan wilayah Kabupaten Semarang berdasarkan pola penggunaan lahan yang ada?*
2. *Bagaimanakah sebaran potensial rawan tanah longsor di wilayah Kabupaten Semarang?*
3. *Bagaimanakah arahan kesesuaian fungsi kawasan di wilayah Kabupaten Semarang?*
4. *Bagaimanakah kecenderungan arah perkembangan guna lahan terhadap potensi rawan tanah longsor di wilayah Kabupaten Semarang?*
5. *Apa saja pola-pola mitigasi yang dapat diterapkan untuk pengembangan penggunaan lahan di Kabupaten Semarang yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya?*

1.3. Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian adalah mengkaji kesesuaian pola-pola dan pengembangan penggunaan lahan yang didasarkan pada tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan menilai tingkat kerawanan longsor dengan mengacu pada 7 (tujuh) parameter nilai kerawanan tanah longsor yang disusun oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hutan dan Konsevasi Alam Bogor. Ketujuh parameter tersebut antara lain intensitas curah hujan, kelerengan, batuan penyusun, struktur geologi, jenis tanah, penggunaan lahan dan kepadatan permukiman.

Penelitian ini ditujukan untuk pengembangan ilmu lingkungan khususnya di bidang manajemen lingkungan perkotaan sehingga konsep kota yang berkelanjutan dilandasi prinsip *ecology, economy, equity, engangement, energy, ethics* dan *aesthetics* dapat terwujud dengan baik dan seimbang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana yang ditujukan untuk mengurangi kerugian dan kerusakan yang diakibatkan dari bencana longsor dan dapat memberikan pertimbangan untuk mendukung proses pengembangan wilayah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan daya dukung lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana pola penggunaan lahan dengan memperhatikan kerawanan longsor yang terjadi sehingga dapat memperkecil dampak yang buruk baik terhadap masyarakat maupun lingkungan.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini antara lain identifikasi penggunaan lahan eksisting wilayah Kabupaten Semarang yang menjadi dasar untuk analisis perkembangan penggunaan lahan. Selain itu juga dilakukan identifikasi kondisi sosial dan fisik lingkungan Kabupaten Semarang yang meliputi ketinggian (elevasi), intensitas curah hujan, kelereng, batuan penyusun, struktur geologi, jenis tanah, penggunaan lahan dan kepadatan permukiman. Identifikasi tersebut menjadi dasar untuk analisis perkembangan penggunaan lahan, analisis tipologi kawasan rawan bencana longsor yang akan menghasilkan karakteristik zona berpotensi longsor dan analisis tingkat kerawanan longsor melalui proses *overlay* peta. Dari tipologi kawasan rawan bencana longsor dan analisis tingkat kerawanan longsor, akan dilanjutkan dengan analisis kesesuaian fungsi kawasan untuk menentukan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Analisis ini juga membandingkan antara kesesuaian fungsi kawasan berdasarkan tingkat kerawanan longsor dengan rencana fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya pada RTRW Kabupaten Semarang tahun 2007-2025.

Tahap selanjutnya adalah analisis kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan daya dukung lingkungan dengan meng-*cross-check* kesesuaian fungsi kawasan lindung dan budidaya melalui proses *overlay* peta sehingga akan diketahui persebaran penggunaan lahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Dan pada tahap akhir adalah memberikan arahan dan saran dalam pengembangan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi kawasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang mengkaji tentang kesesuaian pola penggunaan lahan berdasarkan tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Semarang, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya di bidang lingkungan dengan mengacu pada konsep *sustainability* yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pembangunan wilayah ke depan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

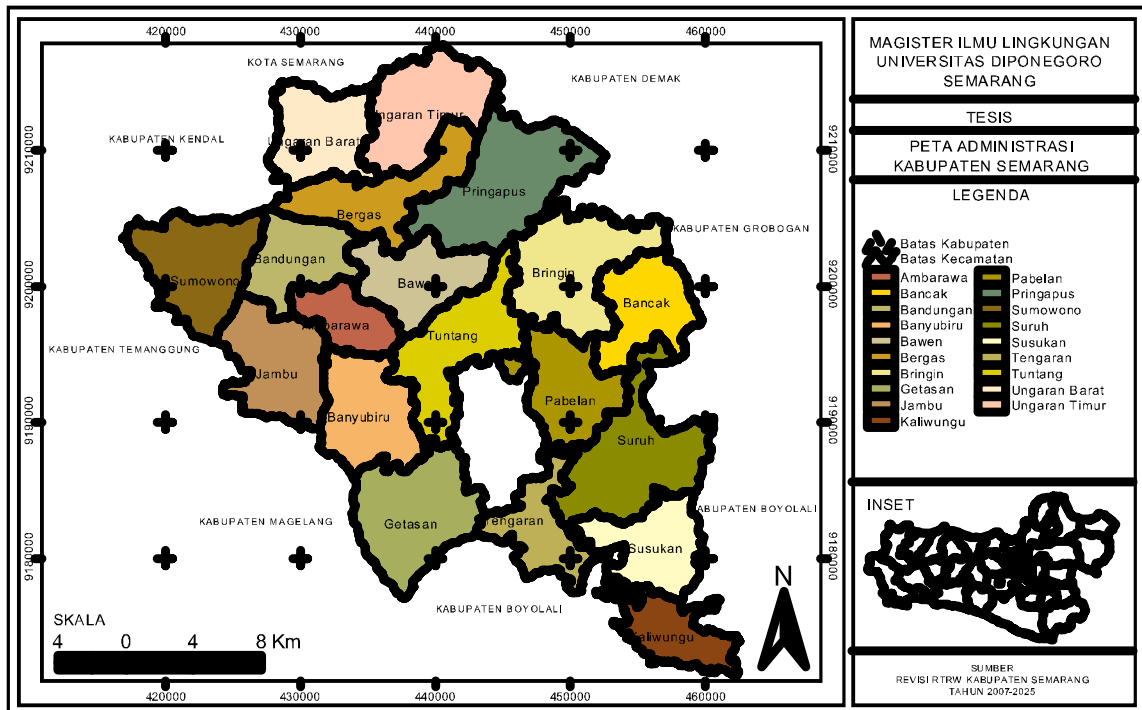
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan arahan yang tepat dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan masyarakat terutama di kawasan rawan bencana longsor. Selain itu dari kajian tersebut, diharapkan dapat meminimalisasi kerugian yang terjadi akibat bencana longsor, baik korban jiwa maupun materi,

yang dilakukan melalui penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana alam sehingga penciptaan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dapat terwujud.

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Semarang terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54,74''$ - $110^{\circ} 39' 3''$ BT dan $7^{\circ} 3' 57''$ - $7^{\circ} 30' 0''$ LS, dengan luas wilayah 95.020,67 hektar atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan.



Gambar 1.2

Peta Administrasi Kabupaten Semarang

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pola penggunaan lahan berdasarkan tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Semarang yang dikaji dari beberapa aspek, antara lain:

1. Ketinggian/elevasi

Ketinggian suatu lahan diukur/dihitung dari tinggi muka air laut rata-rata, yaitu rata-rata tinggi air laut pasang dan tinggi air laut surut. Berdasarkan elevasinya relief lahan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria yaitu:.

Tabel 1.1
Klasifikasi Relief Berdasarkan Beda Elevasi

No.	Beda Elevasi (m)	Deskripsi
1.	< 25	Topografi rata-hampir rata
2.	< 50	Sangat Bergelombang
3.	25 - 75	Sedikit Bergelombang-Sangat Bergelombang
4.	50 - 150	Sangat Bergelombang-Berbukit
5.	100 - 200	Berbukit
6.	200 - 500	Berbukit-Bergunung
7.	> 500	Pegunungan

Sumber: Zuidam (1963)

2. Curah hujan

Hujan memainkan peranan penting dalam erosi tanah melalui tenaga pelepasan dari pukulan butir-butir hujan pada permukaan tanah. Karakteristik yang paling berpengaruh adalah intensitas curah hujan. Jika intensitas hujan tinggi maka erosi tanah yang terjadi akan cenderung tinggi dan jika intensitas hujan rendah maka erosi tanah yang terjadi akan cenderung rendah.

3. Kemiringan lereng

Kemiringan lereng adalah perbandingan antara beda tinggi (jarak vertikal) suatu lahan dengan jarak mendatarnya. Besar kemiringan lereng dapat dinyatakan dengan beberapa satuan, diantaranya adalah dengan % (prosen) dan ° (derajat).

Terjadinya longsoran akan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kemiringan lereng. Kemiringan lereng akan mempengaruhi kecepatan aliran air permukaan. Pada lahan yang datar atau landai, kecepatan aliran air lebih kecil dibandingkan dengan tanah yang miring (curam). Pada lahan yang datar kebanyakan air hujan meresap ke dalam tanah dan menyebabkan terjadinya proses hidrolisa dan pencucian. Kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa kelas yaitu:

Tabel 1.2

Kelas Lereng

No	Kelerengan (%)	Bentang alam	Sifat dan kesesuaian lahan
1.	0 - 8%	Datar	Cocok untuk pengembangan permukiman dan pertanian. Sebagian wilayah dapat berpotensi terjadi bencana banjir dan drainase yang buruk.
2.	8 - 15%	Landai	Irigasi terbatas tetapi baik untuk pengembangan pertanian tanaman keras, drainase baik dan cocok untuk pembangunan permukiman/perumahan dan areal bisnis.
3.	15 - 25%	Bergelombang	Cocok untuk <i>cultivation</i> , problem erosi cukup besar, cocok untuk pengembangan industri ringan, kompleks permukiman/perumahan dan fasilitas rekreasi.
4.	25 - 45%	Terjal	Cocok untuk dikembangkan menjadi tempat tinggal secara cluster, pariwisata dengan intensitas rendah, hutan dan padang rumput.

No	Kelerengan (%)	Bentang alam	Sifat dan kesesuaian lahan
5.	> 45%	Sangat terjal	Daerah sesuai untuk tempat tinggal satwa liar, hutan dan padang rumput terbatas.

Sumber: Modifikasi Dari Noor, 2005

4. Batuan penyusun

Batuan adalah material alam yang tersusun atas kumpulan (agregat) mineral baik yang terkonsolidasi maupun yang tidak terkonsolidasi yang merupakan penyusun utama kerak bumi serta terbentuk sebagai hasil proses alam. Batuan bisa mengandung satu atau beberapa mineral. Material penyusun batuan terdiri atas tuff, abu breksi anglomerat dan sisipan aliran lava. Sedangkan berdasarkan cara terbentuknya, batuan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a) batuan beku : sebagai hasil proses pembekuan atau kristalisasi magma
- b) batuan sedimen : sebagai hasil proses sedimentasi
- c) batuan metamorf : sebagai hasil proses metamorfosa

5. Struktur Geologi

Adalah suatu struktur atau kondisi geologi yang ada di suatu daerah sebagai akibat dari terjadinya perubahan-perubahan pada batuan oleh proses tektonik atau proses lainnya. Geologi struktur terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1) Kekar/Rekahan (Joint)

Kekar adalah suatu retakan pada batuan yang tidak/belum mengalami pergerakan. Kekar dapat menjadi tempat tersimpannya sumber mineral industri tertentu, atau sebagai jalan bagi aliran air tanah. Kekar dapat terbentuk sebagai:

- Kekar pengkerutan, disebabkan oleh gaya pengkerutan yang timbul karena pendinginan atau pengeringan, biasanya berbentuk poligonal yang memanjang.
- Kekar lembaran, sekumpulan kekar yang sejajar dengan permukaan tanah, terutama pada batuan beku. Terbentuk karena hilangnya beban di atasnya.
- Kekar tektonik, terbentuk karena proses tektonik, atau gaya-gaya akibat pergerakan permukaan bumi.



Sumber: Prihantono, 2009

Gambar 1.3

Kekar/Rekahan

Berdasarkan genesanya, kekar terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- Kekar gerus yaitu kekar yang terbentuk oleh gaya kompresi. Biasanya berpasangan, pada breksi memotong fragmen, bidang kekar lurus dan rata. Batuan akan menjadi terkoyak atau menjadi rapuh.
- Kekar tarik yaitu kekar yang terbentuk oleh gaya tarik. Biasanya tidak berpasangan, tidak memotong fragmen pada breksi, bidang kekar biasanya tidak lurus dan tidak rata. Batuan menjadi terbuka

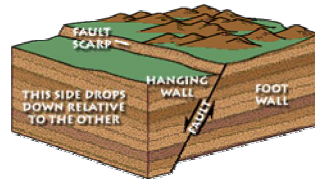
Sedangkan berdasarkan kedudukan terhadap bidang lain, kekar terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- Dip joint : Jurusnya relatif sejajar dengan arah kemiringan lapisan batuan
- Strike joint : Jurusnya sejajar dengan arah kemiringan lapisan batuan
- Bedding joint : Bidanganya sejajar dengan bidang perlapisan batuan di sekitarnya
- Diagonal joint : Jurusnya memotong miring bidang perlapisan batuan sekitarnya

2) *Sesar/Patahan (Fault)*

Adalah kekar/retakan batuan yang telah mengalami perpindahan atau pergeseran. Sesar atau fault terbagi menjadi beberapa type yaitu :

- patahan/sesar turun atau disebut juga patahan/sesar normal adalah satu bentuk rekahan pada lapisan bumi yg memungkinkan satu blok batuan bergerak relatif turun terhadap blok lainnya.

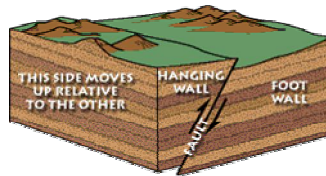


Sumber: Prihantono, 2009

Gambar 1.4

Patahan/Sesar Turun

- patahan/sesar naik (dalam istilah geologinya adalah "reverse fault") adalah satu bentuk rekahan pada lapisan bumi yg memungkinkan bagian *hanging wall*nya relatif bergerak naik terhadap bagian *foot wall*. Salah satu cirinya adalah sudut kemiringan dari sesar tersebut termasuk kecil, berbeda dgn sesar turun yang punya sudut kemiringan bisa mendekati *vertical*.



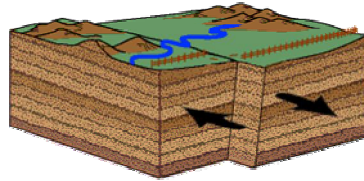
Sumber: Prihantono, 2009

Gambar 1.5

Patahan/Sesar Naik

- patahan/sesar geser, terbagi menjadi dua yaitu: sesar mendatar ke kiri (satu blok bergerak relatif ke kiri terhadap blok yg lainnya) dan sesar mendatar ke kanan (satu blok bergerak relatif ke kanan terhadap blok yg lainnya). Pada sesar geser, gaya/energi-nya berada pada arah horizontal dimana lapisan batuan yang berwarna lebih merah pada blok sebelah kiri berada pada posisi yg relatif sama

dgn lapisan batuan pada blok sebelah kanan, hanya saja blok sebelah kiri ini sudah bergerak relatif mendatar terhadap blok yg sebelah kanan.



Sumber: Prihantono, 2009

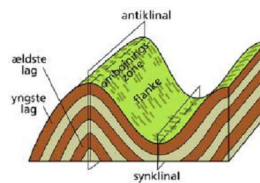
Gambar 1.6

Patahan/Sesar Geser

3) Lipatan (Fold)

Adalah permukaan pada batuan, baik dalam batuan sedimen maupun batuan metamorf. Ada dua tipe utama dari lipatan adalah:

- Antiklin : lipatan bentuk cembung ke arah atas.
- Sinklin : lipatan bentuk cekung ke arah bawah.



Sumber: Prihantono, 2009

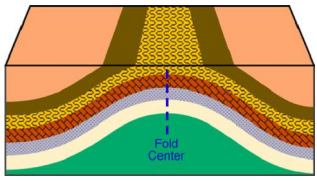
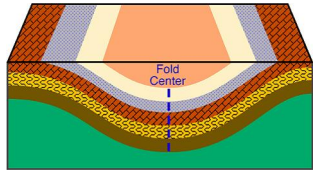
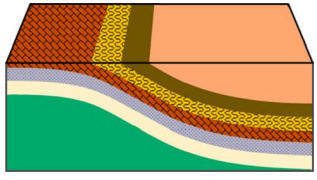
Gambar 1.7

Lipatan

Tabel 1.3

Bentuk Lipatan

No	Jenis	Keterangan
----	-------	------------

1.	Antiklin	
2.	Sinklin	
3.	Antiklinorium	
4.	Sinklinorium	
5.	Monoklin	

Sumber: Prihantono, 2009

6. Jenis tanah

Tanah secara geologi merupakan hasil pelapukan batuan yang ada di permukaan bumi. Sedangkan secara fisik, tanah terdiri dari partikel mineral dan organik dengan berbagai ukuran dan komposisi. Diantara partikel tersebut terdapat pori-pori yang berisi air dan udara dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik. Secara umum, sifat-sifat tanah dapat dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu (Suripin, 2001):

- a) Alluvial : tanah berasal dari endapan baru, berlapis-lapis kandungan bahan organik berubah secara tidak teratur terhadap kedalaman. Kandungan pasir kurang dari 60%.
- b) Andosol : tanah-tanah pada umumnya berwarna hitam, kerapatan limak (*bulk density*) kurang dari 0,85 gr/cm³, banyak mengandung bahan amorf atau lebih dari 60% terdiri dari abu vulkanik vitrik, cinders atau bahan proklastik lain.
- c) Grumosol : tanah dengan kadar liat lebih dari 30% bersifat mengembang dan mengerut. Kalau musim kering tanah keras dan retak-retak dan pada kondisi basah lengket (mengembang)

- d) Latosol : tanah dengan kadar liat lebih dari 60%, remah sampai gumpal, gembur, warna tanah seragam, solum dalam >150 cm
- e) Litosol : tanah mineral dengan ketebalan 20 cm atau kurang. Dibawahnya terdapat batuan keras yang padu.
- f) Mediteran : tanah dengan horizon penimbunan liat (horizon argilik) dan kejenuhan basa lebih dari 50%.
- g) Organosol : tanah organik (gambut) yang ketebalannya lebih dari 50 cm.
- h) Planosol : tanah dengan horizon albik yang terletak di atas horizon argilik atau natrik yang mempunyai permeabilitas rendah dimana memperlihatkan perubahan tekstur yang nyata.
- i) Podsol : tanah dengan horizon penimbunan besi, aluminium oksida dan bahan organik.
- j) Podsolik : tanah dengan penimbunan liat dan kejenuhan basa kurang dari 50% tidak horizon albik.
- k) Regosol : tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%.

7. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Sistem penggunaan lahan terdiri dari dua jenis yaitu penggunaan lahan untuk fungsi lindung dan penggunaan lahan untuk fungsi budidaya.

8. Kepadatan Penduduk

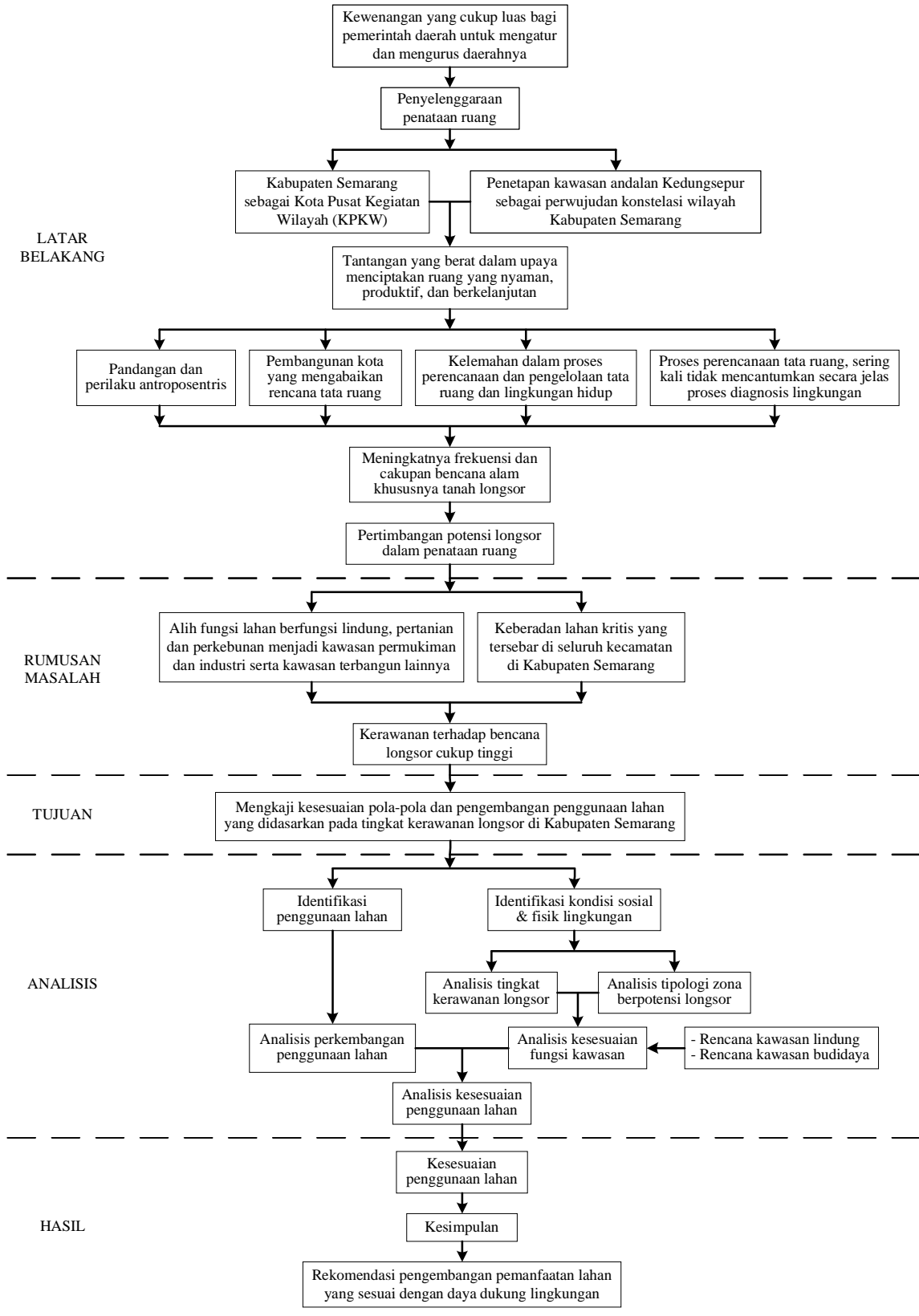
Kepadatan adalah sejumlah manusia dalam setiap unit ruangan atau sejumlah individu yang berada di suatu ruang atau wilayah tertentu dan lebih bersifat fisik. Kepadatan permukiman adalah kepadatan penduduk per-satuan luas permukiman (contoh: 200 jiwa/ha).

1.6. Kerangka Pikir

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah setelah bergulirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan suatu wilayah khususnya di Kabupaten Semarang. Salah satu implikasinya adalah kewenangan

pemerintah daerah yang luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya dalam hal perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta perencanaan dan pengendalian pembangunan. Perwujudan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah penetapan Kabupaten Semarang sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah (KPKW). Kebijakan tersebut telah membawa konsekuensi besar terhadap jenis kegiatan dan fasilitas yang harus dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan penduduk yang ada di sekitarnya. Selain itu juga, wilayah Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai kawasan andalan Kedungsepur yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi). Strategi pengembangan kawasan andalan Kedungsepur adalah pembangunan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan, pembangunan dengan menitikberatkan pada pemerataan dan pembangunan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan serta pemerataan. Namun di sisi lain, upaya untuk menciptakan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dirasa masih menghadapi tantangan yang berat. Penyebabnya antara lain adanya pandangan dan perilaku antroposentris yang telah menyebabkan degradasi lingkungan dan bahkan bencana lingkungan, pembangunan kota yang mengabaikan rencana tata ruang, kelemahan dalam proses perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup serta proses perencanaan tata ruang sering kali tidak mencantumkan secara jelas proses diagnosis lingkungan. Hal tersebut telah berdampak pada peningkatan frekuensi dan cakupan bencana khususnya tanah longsor. Bencana tanah longsor tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan yang memiliki fungsi lindung, pertanian dan perkebunan menjadi kawasan permukiman, industri dan kawasan terbangun lainnya serta potensi lahan kritis yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Semarang.

Kondisi tersebut telah mengarahkan pada perlunya pertimbangan potensi longsor dalam proses penataan ruang baik pada tingkat nasional, Provinsi atau kabupaten/kota. Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pola-pola dan pengembangan penggunaan lahan yang didasarkan pada tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan mengidentifikasi penggunaan lahan dan eksisting kondisi fisik lingkungan Kabupaten Semarang. Identifikasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan beberapa tahapan analisis yang meliputi analisis perkembangan penggunaan lahan, analisis tipologi zona berpotensi longsor, analisis tingkat kerawanan longsor, analisis kesesuaian fungsi kawasan dan analisis kesesuaian penggunaan lahan. Dari analisis tersebut akan dicapai sebuah rekomendasi untuk arahan pengembangan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.



LATAR BELAKANG

RUMUSAN MASALAH

TUJUAN

ANALISIS

HASIL

Gambar 1.8
Kerangka Pikir

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari enam bab yang secara singkat diuraikan dalam sistematika penulisan berikut.

Bab I menjelaskan tentang latar belakang studi, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, kerangka pikir, dan sistematika pembahasan. Dari bab ini akan diperoleh gambaran awal mengenai alasan pengambilan tema mengenai kajian kesesuaian pola penggunaan lahan berdasarkan tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Semarang. Bab II menguraikan tentang metode yang akan digunakan yang meliputi metode penelitian, dan proses penelitian. Bab III menjelaskan tentang kajian teoritis yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan kerawanan bahaya longsor. Kajian teoritis memiliki fungsi untuk men-sistematisasi dan memperkuat proses penelitian sehingga penyusunan latar belakang hingga penentuan kesimpulan dan saran memiliki keselarasan dan saling berkaitan. Bab IV menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Semarang. Bab ini menguraikan tentang data mengenai geografis wilayah, demografi dan fisik lingkungan. Bab V menguraikan tentang kesesuaian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Semarang. Dalam bab ini merupakan penjabaran dari tautan antar data melalui proses analisis yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian. Bab VI menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam pengembangan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.